

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan investasi akan mempengaruhi kesejahteraan negara karena ketika investasi suatu negara mengalami peningkatan akan mendukung negara tersebut dalam memproduksi barang atau jasa sehingga urusan negara dapat terpenuhi. Investasi merupakan faktor penentu tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi menjadi tolak ukur suatu negara bisa dikatakan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik atau buruk.

Penanaman modal atau investasi menurut Undang-Undang pasal 1 ayat 1 nomor 25 tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia². Undang-undang tentang penanaman modal ini merupakan upaya penyesuaian dari peraturan perundang-undangan penanaman modal yang terdahulu, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi global, khususnya liberalisasi perdagangan dan investasi sebagai tuntutan dari Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang oleh Indonesia

² Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat (1)

pemberlakuannya telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994³.

Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan maksud untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia akan lebih efektif dengan adanya dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah. Sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi⁴. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Otonomi daerah juga menempatkan kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengelola daerahnya, sehingga menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Salah satu aspek yang utama dalam pertumbuhan daerah yaitu investasi. Karena pada setiap daerah telah merancang berbagai penawaran tentang potensi daerah kepada calon investor untuk menanamkan modal di daerahnya. Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah otonom yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal yang bisa dinikmati oleh masyarakatnya⁵.

³ Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 7.

⁴ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 2.

⁵ Frikinur, *Analisis Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Blitar* (Surabaya: Tesis, Universitas Airlangga, 2020), hal. 1—2.

Faktor-faktor yang mendorong investasi suatu perusahaan antara lain ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum, informasi tentang potensi daerah/daerah, kebijakan investasi, dukungan sumber daya manusia, dan jaminan kepastian hukum. Informasi yang dibutuhkan investor seringkali diberikan dalam bentuk kebutuhan investasi, kebijakan investasi, kemampuan dan peluang bisnis di sektor tertentu. Mendorong dan menarik investasi lokal memerlukan profil potensi daerah sehingga investor dapat melihat peluang investasi dan membuat keputusan investasi lebih cepat. Bagi investor, informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lokasi untuk investasi. Tetapi hal ini tidak cukup sampai sebatas ketersediaan informasi saja. Diperlukan rangkaian upaya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai iklim investasi di berbagai daerah, untuk membantu para investor dalam membuat keputusan lokasi investasinya⁶.

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588,79 km² dimana sekitar 38,02 persen merupakan wilayah dataran tinggi yang berada pada ketinggian 300-420 dari permukaan laut. Secara administratif Kabupaten Blitar terbagi dalam 22 kecamatan, terdiri dari 248 desa/kelurahan yaitu, 28 kelurahan dan 220 desa. Hamparan wilayah Kabupaten Blitar merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata $\pm$ 243 meter di atas permukaan laut . Keberadaan Sungai

⁶ Lazwardi, "*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2000-2014.*" (Yogyakarta: Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017), hal. 5.

Brantas membagi wilayah Kabupaten Blitar menjadi 2 bagian, yaitu wilayah Kabupaten Blitar bagian Utara dan wilayah Kabupaten Blitar bagian Selatan.

Kabupaten Blitar memiliki daya tarik potensi dan kekayaan pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil-hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, selain itu juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perizinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “*point of essential*” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar⁷.

Analisa apabila realisasi nilai investasi di Kabupaten Blitar dengan daerah lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Blitar
dengan Daerah Lain Tahun 2023

Kabupaten/Kota Lain:

No.	Daerah	Realisasi Nilai Investasi (Triliun)
1.	Kabupaten Blitar	2,9 Triliun
2.	Kota Blitar	0,3 Triliun

Provinsi:

No.	Daerah	Realisasi Nilai Investasi (Triliun)
1.	Kabupaten Blitar	2,9 Triliun

⁷ Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, “Gambaran Umum” dalam <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum-2/>, diakses 20 September 2023

2.	Povinsi Jawa Timur	145,1 Triliun
----	--------------------	---------------

Nasional:

No.	Daerah	Realisasi Nilai Investasi (Triliun)
1.	Kabupaten Blitar	2,9 Triliun
2.	Povinsi Jawa Barat	210,6 Triliun

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Blitar

Jika dibandingkan dengan Kota Blitar realisasi nilai investasi di Kabupaten Blitar jauh lebih tinggi karena wilayah Kabupaten Blitar lebih luas daripada Kota Blitar. Kemudian jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat realisasi nilai investasi di Kabupaten Blitar lebih kecil. Realisasi Investasi Provinsi Jawa Timur adalah realisasi nilai investasi tertinggi nomor 3 (tiga) tingkat nasional dan realisasi nilai investasi Provinsi Jawa Barat adalah realisasi nilai investasi tertinggi pertama tingkat nasional. Pada tingkat nasional realisasi nilai investasi di Kabupaten Blitar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat karena realisasi nilai investasi Provinsi Jawa Barat adalah tertinggi pada tingkat nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tercapainya realisasi nilai investasi di Kabupaten Blitar sebesar 2,9 Triliun adalah termasuk pencapaian yang bagus untuk Kabupaten Blitar.

Melalui strategi investasi yang dilakukan secara tepat akan dapat mendukung peningkatan penanaman modal sehingga terciptanya iklim investasi yang kondusif. Iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi

strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan investasi di Kabupaten Blitar, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17)⁸.

Untuk mencapai suatu sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi atau tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sendiri maka dibutuhkan rencana kerja strategis. Mengingat pentingnya pembuatan strategi ini, terutama bagi peningkatan investasi di daerah khususnya di Kabupaten Blitar maka diperlukan suatu penelitian mengenai strategi memasarkan daerah di era otonomi. Untuk meningkatkan investasi selain melalui pemasaran daerah juga memerlukan strategi pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan aktivitas izin usaha di daerah Kabupaten Blitar bagi para investor.

Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi untuk meningkatkan investasi lokal melalui pihak lembaga pemerintah daerah yang mempunyai keterkaitan dengan daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan karena keingintahuan peneliti terhadap strategi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga terjadi peningkatan investasi di Kabupaten Blitar. Dari uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Dinas Penanaman**

⁸ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, “Sekilas DPMPTSP” dalam https://dpmptsp.blitarkab.go.id/?page_id=19840, diakses 21 September 2023

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Blitar”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Blitar?
2. Apa saja faktor pendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Blitar?
3. Apa saja faktor penghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Blitar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah kajian keilmuan dan wawasan pengetahuan tentang investasi.
- b. Memberikan wawasan pengetahuan agar memperkaya referensi tentang strategi dalam meningkatkan investasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga.

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga pemerintah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar dalam meningkatkan investasi.

- b. Bagi akademik.

Sebagai tambahan referensi perpustakaan program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berkaitan dengan investasi.

- c. Peneliti selanjutnya.

Memberikan sumbangan pemikiran, referensi, dan wawasan bagi penelitian selanjutnya terutama tentang investasi.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Strategi.

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai⁹.

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah¹⁰.

c. Meningkatkan.

Meningkatkan adalah menaikkan (derajat, taraf, dsb); mempertinggi; memperhebat (produksi, dsb); mengangkat diri¹¹.

d. Investasi.

Investasi adalah kegiatan yang dilakukan orang pribadi (*natural person*) atau badan hukum (*juridical person*) dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya baik berbentuk

⁹ Umar, Husein, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013), hal. 16

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 1 Ayat (1)

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meningkatkan>, diakses pada 20 September 2023

uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), asset tak bergerak, hak kekayaan intelektual, maupun keahlian¹².

2. Definisi Operasional

Pada penelitian ini membahas tentang upaya, cara, strategi yang menyangkut kegiatan manajemen untuk mengoperasikan strategi, meninjau kembali dan evaluasi, untuk menilai apakah organisasi berjalan ke arah tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Sehingga dari definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa upaya, cara atau strategi yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang isi dari keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir dari penelitian. Bagian awal terdiri dari halaman dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Guna untuk menyusun skripsi akan disajikan sistematika penulisan yang terdiri dari 6 bab adalah sebagai berikut:

¹² Ana, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, (Sinar Grafika: Jakarta. 2009), hal. 36

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi: halaman depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Inti

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang beberapa teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan. Dalam bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan analisa maupun perbandingan dalam membahas objek penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pengecekan keabsahan temuan penelitian. Hal tersebut berguna untuk mendapatkan dan mengumpulkan data untuk mendukung penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari paparan data atau temuan penelitian yang terdapat pada hasil wawancara dengan

pihak lembaga Kabupaten Blitar. Sehingga pada bab ini menjadi upaya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada pada fokus penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil temuan penelitian yang bersangkutan dengan menganalisis sesuai teori yang ada dengan cara menganalisis antara fakta dilapangan dari temuan peneliti dengan teori dan penelitian terdahulu terdiri dari: pembahasan dan analisis hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang akan ditujukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan hal tersebut, diharapkan akan berguna bagi para pembaca untuk mengetahui dan memahami secara detail terkait permasalahan yang terjadi.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.